ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016

Oleh :

Nama	:	Hadiyan Wihady Rahman
Nomor Mahasiswa	:	14313160
Program Studi	:	Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 – 2016

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Hadiyan Wihady Rahman

Nomor Mahasiswa : 14313160

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulis skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Oktober 2018

Penulis,

Hadiyan Wihady Rahman

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 – 2016

Nama	: Hadiyan Wihady Rahman
Nomor Mahasiswa	: 14313160
Program Studi	: Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 1 Oktober 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing :

Sahabuddin Sidiq,Dr., S.E., M.A.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016

Disusun Oleh : **HADIYAN WIHADY RAHMAN**

Nomor Mahasiswa : **14313160**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 19 November 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., MA. .....

Penguji : Jannahar Saddan Ash S, SEI., MEK. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya tulis sederhana ini saya persembahkan untuk :

- Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikamat dan anugerah yang indah sehingga dalam detik ini masih dapat mengejar cita-cita.
- Dosen pembimbing Bapak Sahabuddin Sidiq Dr., S.E., M.A. yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kedua orang tua tercinta Alm Bapak Suhardi dan Mama Baiq Nur Handayani yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang begitu dahsyat yang sangat berdampak bagi saya.
- Bibik Nirwana dan Hj Nur Wahida yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
- Adik perempuan Wihadiyani Dwi Rahmah dan Fidela Lathifa Rahmah serta kakak dan adik sepupu Ulfirrahman Nizar dan Zara Desriana Widia yang selalu memberikan motivasi didalam mengerjakan skripsi.
- Fadilah Syafitri yang selalu mendampingi, memotivasi dan memberikan dukungan dikala suka maupun duka.
- Teman-teman ku Rendi, Agung Rinaldi, Nizar yang selalu meluangkan waktunya untuk membantuku dalam segala keadaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, serta shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, karena syafaatnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2016" dapat berjalan baik dan lancar.

Penelitian ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Strata 1 pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari, selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari batuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Sahabuddin Sidiq Drs. MA,. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, arahan dan kesabaran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas saran, motivasi dan bimbingannya. Ilmu yang telah bapak berikan akan penulis jadikan bekal dimasa mendatang.
2. Kedua Orang tua tercinta, Alm Bapak Suhardi Spd dan Mama Baiq Nur Handayani Spd sebagai motivasi utama dan penyemangat dalam hidupku

yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan nasehat, memberikan motivasi dan dukungan, serta pelajaran hidup. Merekalah yang senantiasa mengembangkan semangat ku.

3. Bibik tercinta, Nirwana dan Hj Nur Wahida, tidak lupa juga Mbah perempuan tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi.
4. Adik adik tercinta, Wihadiyani Dwi Rahmah dan Fidela Lathifa Rahmah, tidak lupa juga kakak dan adik sepupu, Ulfirrahman Nizar dan Zara Desriana Widia yang senantiasa menghibur, memberikan canda tawa kerinduan dalam keluarga.
5. Fadilah Syafitri yang selalu memberikan semangat, mendampingi dan memotivasi dalam suka maupun duka.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Ekonomi FE UII 2014.
7. Teman-teman KKN unit 39 dan unit Bruno Purworejo. Terima kasih atas pelajaran dan kenangan yang tak terlupakan selama kegiatan KKN.
8. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan, hanya doa yang dapat penulis panjatkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan perlindungan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali Allah SWT, begitu pula dengan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan senang

hati penulis mengharap kritik serta saran agar menjadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umunya. Dan harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Oktober 2018

Penyusun,

Hadiyan Wihady Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM.....iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

HALAMAN BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI.....v

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vi

HALAMAN KATA PENGANTAR vii

HALAMAN DAFTAR ISI x

HALAMAN DAFTAR TABEL xiii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xiv

HALAMAN ABSTRAK.....xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....1
1.2. Rumusan Masalah.....8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....9
1.4. Sistematika Penulisan.....10

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka.....11
2.2. Landasan Teori.....17
2.2.1. Pariwisata.....17
2.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....21
2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....39
2.2.5. Jumlah Wisatawan.....41

2.2.6. Pembangunan/Infrastruktur 42
2.3. Hipotesis 43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 44
3.1.1. Jenis dan Sumber Data 44
3.2 . Definisi Operasional Variabel 44
3.3. Metode Analisis Data 45
3.3.1. Analisis Regresi Data Panel 45
3.4. Estimasi Regresi Data Panel 46
3.4.1. Common Effect Model (CEM) 46
3.4.2. Fixed Effect Model (FEM) 47
3.4.3. Random Effect Model (REM) 48
3.5. Penentuan Model Estimasi 48
3.5.1. Chow test 49
3.5.2. Hausmant Test 50
3.5.3. Uji Lagrange Multiplier 52
3.6. Pengujian Statistik 52
3.6.1. Koefisien Determinasi 53
3.6.2. Koefisien Regresi (Uji F) 54
3.6.3. Koefisisen Regresi Secara Parsial (Uji t) 56

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1. Analisis Deskripsi Data 58
4.2. Deskripsi Objek Penelitian 58
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah 58
4.2.2. Pajak Hotel dan Restauran 59
4.2.3. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 60
4.2.4. Jumlah Wisatawan 61
4.2.5. Jumlah Pengeluaran Pembangunan 62
4.3. Hasil Model Estimasi Data Panel 63

4.3.1. Uji Chow Test 63
4.3.2. Uji Hausman Test 64
4.3.3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model 66
4.3.4. Koefisien Determinasi (R^2) 67
4.3.5 Uji Signifikansi Simultan (uji F) 68
4.3.6. Uji Signifikansi Parameter Individu (uji t) 68
4.3.7. Persamaan Estimasi Dengan Intersep Pembeda Cross Effect 69
4.4. Analisis Ekonomi 71
4.4.1. Analisi Pengaruh Jumlah Pajak Hotel Dan Restaurant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta 71
4.4.2. Analisis Pengaruh Jumlah PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta 72
4.4.3. Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta 73
4.4.4. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pembangunan/Infrastruktur Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta 74

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan 75
5.2. Implikasi 75
DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN 79

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1 Pajak Hotel Dan Restoran di DIY Tahun 2013 – 2016……5
Tabel 1.2 PDRB DIY Tahun 2013 – 2016 ……..5
Tabel 1.3 Jumlah Wisatawan 2013 – 2016 ……6
Tabel 1.4 Pengeluaran Pembangunan ……7
Tabel 4.1 PAD DIY Tahun 2010 – 2016 ……..59
Tabel 4.2 Pajak Hotel dan Restoran tahun 2010 – 2016 ……...60
Tabel 4.3 PDRB DIY Tahun 2010 – 2016 ……61
Tabel 4.4 Jumlah Wisatawan Tahun 2010 – 2016 ……62
Tabel 4.5 Pengeluaran Pembangunan ……...62
Tabel 4.6 Hasil Chow Test ……64
Tabel 4.7 Hasil Haustman Test ……65
Tabel 4.8 Hasil Fixed Effect ……66
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis ……68
Tabel 4.10 Hasil Nilai Crossid ……..70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

I. Variabel Dependen dan Independent ……80

II. Hasil Uji Chow Test ……..81

III. Hasil Uji Hausman Test …….....81

IV. Hasil Uji Common Effect Models …….....82

V. Hasil Uji Fixed Effect Models ……..83

VI. Hasil Uji Random Effect Models ……..84

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel, Uji *Chow test*, Uji *Hausman test*, dan Uji Statistik untuk mengetahui bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh menyatakan bahwa variable jumlah pajak hotel dan restoran serta jumlah PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan jumlah wisatawan dan pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel jumlah pajak hotel dan restoran, jumlah PDRB, jumlah wisatawan dan pengeluaran pembangunan mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 97% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti bahwa variable tersebut memiliki peran yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel dan Restoran, PDRB, Jumlah Wisatawan dan Pengeluaran Pembangunan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai tugas dalam membangun masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Dengan demikian segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus di alokasikan secara efektif dan efisien melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus yang disebut pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil.

Dalam pasal 18 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang Undang". Pasal tersebut dapat digunakan sebagai landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi melalui kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang dimaksud adalah otonomi daerah yang berarti sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dengan dikeluarkannya Undang Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah di berikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara

lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang di serahkan, untuk tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menggali potensi sumber sumber pendapatan asli daerah dan pemerintah harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan Pemerintah Daerah, Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Di samping pengelolaan terhadap sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada perlu di tingkatkan dan daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber PAD sehingga dengan semakin banyak sumber sumber PAD yang dimiliki, Daerah akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya serta potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan.

Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek social budaya, ekonomi, dan politik (spillane, 1994). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang Unndang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di tujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanjanya, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (tourism final demand) pasar barang dan jasa. Selanjutnya Final Demand wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (investment derived demand) untuk berproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan, restoran dan lain-lain.

Daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa memiliki luas wilayah 3.186 km^2 dan memiliki jumlah penduduk

3.720.912 jiwa yang terkenal dengan sektor pariwisatanya. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, provinsi Yogyakarta berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 pasal 2 adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restaurant
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Rekalame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Wallet
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tabel 1.1

Jumlah pajak hotel dan restaurant di Yogyakarta tahun 2013 – 2016

(ribu rupiah)

tahun	Jumlah pajak hotel dan restaurant
2013	156.889.638
2014	237.039.503
2015	208.918.258
2016	284.042.871

Sumber: BPS DIY

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu, dilihat dari PDRB Yogyakarta yang semakin naik dari tahun ke tahun. Tercatat jumlah PDRB yang ada di Yogyakarta tahun 2013 – 2016.

Tabel 1.2

Jumlah PDRB di DIY tahun 2013 – 2016 (juta rupiah)

tahun	Jumlah PDRB
2013	77.963.016
2014	82.872.588
2015	87.913.326
2016	93.145.882

Sumber: BPS DIY

Majunya industri pariwisata di suatu daerah sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri wisata akan berkembang dengan baik. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik wisata dan merupakan kota tujuan wisata yang paling diminati oleh wisatawan, dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang semakin naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat dari tahun 2013 – 2016 wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta tertera pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Perkembangan jumlah wisatawan ke DIY 2013 – 2016 (orang)

tahun	Jumlah wisatawan
2013	12.883.486
2014	16.774.235
2015	19.021.818
2016	21.445.343

Sumber: Badan Pusat Statistic DIY

Selain jumlah wisatawan, pembangunan/infrastruktur jalan dan transportasi umum juga sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena dengan infrastruktur yang baik dan transportasi umum yang mudah, nyaman dan aman akan membuat wisatawan tidak risau jika ingin menuju suatu

obyek wisata karena infrastruktur dan transportasi umum telah layak digunakan. Karena, belum tentu semua wisatawan datang ke DIY menggunakan kendaraan pribadi, apalagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DIY dengan menggunakan pesawat. Secara otomatis saat melakukan perjalanan untuk menuju obyek wisata yang mereka inginkan, mereka membutuhkan transportasi umum. Oleh sebab itu, transportasi sangat penting dalam aktivitas kepariwisataan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS DIY, tercatat pengeluaran pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur tahun 2013 – 2016.

Tabel 1.4

Jumlah pengeluaran pembangun tahun 2013 – 2016 (ribu rupiah)

Tahun	Jumlah pengeluaran pembangunan
2013	836.896.152
2014	1.060.222.292
2015	1.439.317.712
2016	1.389.834.512

Sumber: BPS DIY

Keempat aspek yang telah dijabarkan diatas merupakan variabel penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini. Sebelum mendalam untuk pembahasan mengenai keempat variabel tersebut akan dipaparkan pula mengenai pariwisata seperti apa yang baik untuk Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Susiana (2003), industri pariwisata yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah industri pariwisata milik masyarakat (community

tourism development atau CTD). Dengan mengembangkan CTD, pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi yang bersifat legal untuk sumber dana pembangunan. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur Pendapatan Asli Daerah dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Komponen pendapatan asli daerah yang menonjol adalah pajak daerah, retribusi daerah dan laba badan usaha milik daerah.

Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat memperlancar pembangunan infrastruktur. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang di kelola secara efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah di daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, maka penulis memilih judul **"Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016"**.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah kota Yogyakarta dari berbagai obyek dan retribusi serta pajak akan diketahui. Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan menjadi

1. Bagaimana pengaruh jumlah pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi DI.Yogyakarta ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi DI.Yogyakarta?

3. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi DI.Yogyakarta.?
4. Bagaimana pengaruh jumlah pengeluaran pembangunan/infrastruktur terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi DI.Yogyakarta.?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh jumlah pajak hotel dan restauran terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi DI.Yogyakarta
2. Menganalisis pengaruh jumlah PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi DI.Yogyakarta.
3. Menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi DI.Yogyakarta.
4. Menganalisis pengaruh jumlah pengeluran pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi DI.Yogyakarta

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Peneliti dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang.
2. Peneliti dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca dan peneliti tentang pendapatan asli daerah di sektor pariwisata

4. Sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada Bab II berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori. Bagian ini menjelaskan dokumentasi dan hasil kajian literature dari penelitian yang dilakukan sebelumnya agar dapat dijadikan acuan dalam menulis penelitian yang akan datang. Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Bagian menjelaskan hubungan antar variabel terhadap teori yang ada. Pada Bab III yang merupakan metode penelitian berisi tentang uraian metode yang digunakan dalam penelitian, jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Bab IV membahas tentang hasil dan analisis yaitu berisi data penelitian berupa pemaparan data yang digunakan dalam penelitian serta hasil dan data analisis yang merupakan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisisnya. Pada Bab V membahas tentang simpulan yang merupakan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Implikasi merupakan hasil dari simpulan dan digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah diberbagai daerah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Riawan (2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak hotel, pajak restaurant dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kulonprogo. Jenis data yang di gunakan yaitu data sekunder berupa data bulanan dengan periode pengamatan 2011-2013, sumber data tersebut di peroleh dari dinas pendapatan daerah dan dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten kulonprogo. Inti dari hasil analisisnya melalui metode regresi linier berganda melalui alat analisis spss 20 adalah bahwa kontribusi pajak restaurant berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kulonprogo, sedangkan untuk kontribusi pajak hotel dan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kulonprogo. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada jenis variabel dan alat analisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Windriyaningrum (2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan dan jumlah obyek wisata terhadap pendapatan sector pariwisata kabupaten kudus. Jenis data yang di gunakan yaitu data sekunder yang berupa data time series dengan periode pengamatan 1981 sampai 2011, sumber data tersebut di peroleh dari badan pusat statistic, dinas pariwisata dan kebudayaan

serta dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten Kudus. Variabel penelitian terdiri dari varibel dependen yaitu pendapatan sektor pariwisata dan variable independent yaitu tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah obyek wisata. Inti dari hasil analisisnya ialah melalui metode regresi linier berganda dengan alat analisis eviews adalah bahwa tingkat hunian hotel, jumlah kunjungan wisatawan, dan jumlah obyek wisata berpengaruh signifikan terhadap pendapat sektor pariwisata kabupaten Kudus. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada metode objek penelitian dan jenis variabel

Penelitian yang dilakukan oleh Melida (2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat kontribusi, tingkat efisiensi, dan tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time- series yang diperoleh dari dinas pendapat daerah Kabupaten Sleman dengan observasi tahun 2012 sampai 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hotel dan restoran yang dianalisis dengan metode trend linier. Inti dari hasil analisis ini ialah bahwa analisis efisiensi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menutup biaya pemungutan pajak, dengan cara mengukur bagian dari hasil pajak. Pajak hotel dan restoran sebagai salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman, memiliki peran yang sangat penting. Apalagi ditambah dengan beragamnya area pusat keramaian yang saat ini mulai banyak dijumpai disudut kota. Hasil perhitungan efisiensi pelaksanaan pungutan pajak hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Sleman pada tahum 2002 sampai 2011

menunjukkan bahwa rata- rata nilai efisiensi selama sepuluh periode adalah sebesar 18,76%, tingkat efisiensi pungutan pajak hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Sleman tertinggi pada tahun 2007 dengan persentase sebesar 15, 60% dan tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun 2006 dengan persentase sebesar 21,01%. Angka efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Sleman pada tahun 2002, 2003, 2005, 2008, 2011 adalah sangat efisien karen nilai efisiensinya kurang dari 20%. Pada tahun 2004, 2006, 2009 dan 2010 nilai efisiensinya terletak pada tingkat efisien dan hampirsangat efisien karena lebih besar dri 20% tetapi kurang dari 85%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa biaya opersional dari pemungutan pajaknya jauh dibawah besarnya realisasi pajak yang diterima. Sehingga persentsenya sangat kecil. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada metode analisis, tujuan penelitian dan jenis variabel penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Tamam (2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PDRB sektor pedagangan, hotel dan restoran, wisatawan mancanegara, dan tingkat hunian kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran provinsi DKI Jakarta. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data time series dengan periode pengamatan 1997 sampai dengan 2008, sumber data tersebut diperoleh dari badan pusat statistik dan dinas pendapatan daerah provinsi DKI Jakarta. Inti dari hasil analisisnya melalui metode regresi linier berganda dengan regresi log melalui alat analisis eviews adalah bawah : (1) PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran provinsi DKI Jakarta. (2)

Wiatawan mancanegara tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. (3) Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran provinsi DKI Jakarta. (4) Tingkat hunian kamar hotel berpengaruh positif dan sinifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran provinsi DKI Jakarta. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian dan jenis variabel penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2012). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah hotel dan restoran, jumlah wisataan, dan tingkat inflasi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa data time series dengan periode pengamatan 1994 sampai 2009. Sumber data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman. Variabel- vaiabel penelitian terdiri dari variable dependen yaitu pendapatan asli daerah dan variable independent yaitu jumlah hotel dan restoran, jumlah wisatawan dan tingkat inflasi, inti dari hasil analisisnya melalui metode regresi ordinary least square dengan data time series dengan alat analisis eviews adalah bahwa variable jumlah hotel dan restoran, jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman, sedangkan untuk variable inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penapat asli daerah Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada metode analisis, jenis variabel dan metode analisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Rochimah, Siti (2014). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan restaurant, retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di jawa tengah tahun 2007 – 2012. Metode yang digunakan yaitu studi dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk bentuk lain. Data diperoleh dari BPS provinsi Jawa Tengah. Variabel variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel variabel terikat, variabel bebas yaitu pajak hotel, retribusi daerah dan pajak daerah, sedangkan variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah, inti dari hasil analisisnya melalui metode regresi linier berganda dengan alat SPSS adalah bahwa variabel pajak hotel dan restaurant tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan untuk variabel retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Jawa Tengah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada alat analisis, lokasi penelitian dan variabel penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Anggun (2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PDRB, tingkat inflasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi islam (kota Lampung tahun 2006 – 2015). Metode yang digunakan yaitu metode deduktif, data diperoleh dari BPS kota Lampung, variabel variabel penelitian terdiri dari varabel dependen dan variabel independent, variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independent yatu PDRB, tingkat inflasi dan pengeluaran pemerintah, inti dari hasil analisisnya

melalui metode regresi linier berganda dengan alat SPSS adalah bahwa variabel PDRB dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD tahun 2006 – 2015, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD tahun 2006 – 2015. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu alat analisis, lokasi penelitian dan variabel penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Tama, Reno (2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor factor yang mempengaruhi PAD di Karesidenan Surakarta tahun 2011 – 2015. Metode yang digunakan yaitu data sekunder dengan tipe regresi data panel, data diperoleh dari BPS Jawa Tengah, variabel variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dan variabel independent, variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dan variabel independent yaitu PDRB, jumlah penduduk dan pengeluaran infrastruktur, inti dari hasil analisisnya melalui metode regresi data panel menggunakan Random Effect dengan alat eviews adalah bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD keresidenan Surakarta tahun 2011 - 2015, sedangkan jumlah penduduk dan pengeluaran infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap PAD keresidenan Surakarta tahun 2011 – 2015. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan variabel penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Wida, Ade (2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan restaurant, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Kasikmalaya. Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, data diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, variabel variabel terdiri dari variabel dependent dan

variabel independent, variabel dependent yaitu pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independent yaitu pajak hotel dan restaurant, pajak hiburan dan pajak reklame, inti dari hasil analisisnya melalui uji asumsi klasik dengan alat SPSS, bahwa variabel pajak hotel dan restaurant, pajak hiburan dan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah kota Tasikmalaya, terdapat pengaruh signifikan antara pajak hotel dan restaurant, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota tasikmalaya. Pendapatan asli daerah itu dipengaruhi oleh pajak hotel dan restaurant, pajak reklame, pajak hiburan sebesar 94,8%, sisanya adalah sebesar 5,2% yang merupakan pengaruh factor lain. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian, variabel penelitian dan metode analisis.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pariwisata

Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan, disebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Pariwisata berasal dari kata yakni, Pari dan Wisata. Pari diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat

diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel; dalam bahasa Inggris. Maka kata Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut tour (Yoeti, 2001). Pariwisata dapat juga diartikan sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, pariwisata bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini.

Istilah pariwisata ini mulai dipakai setelah tahun 1960 untuk mengganti istilah bertamasya, melancong atau piknik dan memberi pengertian yang sederhana dan sempit yaitu bepergian ke suatu tempat yang tidak jauh untuk sekedar bersantai. Sedangkan dalam era saat ini, alasan dan sifat perjalanan yang dilakukan dalam kaitannya dengan mobilitas pergerakan manusia ini, jauh lebih luas. Oleh karena itu, pariwisata mengandung nilai ekonomi yang tinggi bagi pemanfaatan jasa tersebut sebagai komoditas ekonomi. Suatu perjalan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi persyaratan yang diperlukan yaitu: 1) bersifat sementara, 2) bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi paksaan, 3) tidak bekerja yang bersifat menghasilkan upah ataupun bayaran.

Menurut Pendit (2002) terdapat beberapa jenis pariwisata, yaitu : 1) Wisata Budaya; ini dimaksudkan dengan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri,

mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka budaya, dan seni mereka. Sering perjalanan seperti ini disatukan dengan kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, drama, musik, dan seni suara) atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya; 2) Wisata Kesehatan; hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk meninggalkan keadaan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas kesehatan lainnya; 3) Wisata Olahraga; Ini dimaksudkan dengan wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolah raga atau menghadiri pesta olahraga di suatu tempat atau suatu negara seperti : Asian Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup, dan lain-lain. Olah raga lain yang tidak termasuk dalam pesta olahraga atau games misalnya: berburu, memancing, berenang, dan berbagai cabang olahraga di dalam air atau di pegunungan; 4) Wisata Komersial; yang termasuk dalam wisata komersial ini adalah mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Pada mulanya banyak orang berpendapat bahwa hal ini tidak dapat digolongkan dalam dunia kepariwisataan dengan alasan bahwa kegiatan perjalanan untuk pameran atau pekan raya ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus mempunyai urusan bisnis. Tetapi dalam kenyataannya pada dewasa ini dimana pameran atau pekan raya banyak dikunjungi oleh masyarakat kebanyakan dengan tujuan ingin

melihat yang membutuhkan fasilitas akomodasi dan transportasi; 5) Wisata Politik; jenis wisata ini meliputi perjalanan yang dilakuka untuk mengunjungi atau mengambil bagian dalam peristiwa kegiatan politik misalnya perayaan 17 Agustus di Jakarta. Biasanya fasilitas akomodasi, dan transportasi serta berbagai atraksi diadakan secara meriah bagi para pengunjung. Disamping itu yang termasuk dalam kegiatan wisata politik adalah peristiwa-peristiwa penting seperti: konfrensi, musyawarah, kongres yang selalu disertai dengan kegiatan darmawisata; 6) Wisata sosial; yang dimaksud dengan wisata ini adalah pengorganisasian suatu perjalanan yang murah dan mudah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan, seperti misalnya kaum buruh, pemuda, pelajar, mahasiswa, petani, dan sebagainya. Organisasi ini berusaha untuk membantu mereka yang mempunyai kemampuan terbatas dari segi finansial untuk dapat memanfaatkan waktu libur atau cuti sehingga dapat menambah pengalaman dan memeperbaiki kesehatan jasmaniah dan mental mereka; 7) Wisata Pertanian; wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek- proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan, dan sebagainya dimana wisatawan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun untuk sekedar menikmati aneka macam tanaman; 8) Wisata maritim (bahari); jenis wisata ini biasanya dikaitkan dengan kegiatan oleh raga di air, danau, pantai, teluk, dan laut. Misalnya: memancing, berlayar, menyelem sambil melakukan pemotretaan, kompetisi berselancar, mendayung, berkeliling melihat – lihat taman laut dengan pemandangan yang indah; 9) Wisata Cagar Alam; untuk jenis wisata ini biasanya

diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan, dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh–tumbuhan yang jarang ditemukan di tempat lain.

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132). Menurut Samsubar Saleh (2003) pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah secara umum masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan didaerah. Menurut Mardiasmo (2002:146) masalah-masalah yang disebutkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal

2. Kualitas layanan public yang masih memperihatinkan menyebabkan produk layanan public yang sebenernya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Berkurangnya dan bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak memcukupi).
5. Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Menurut Halim (2004:67) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Menurut Siagian (2000), dalam bukunya yang berjudul Pajak Daerah Sebagai Keuangan Daerah, pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Jenis Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu :

a) Jenis pajak provinsi terdiri atas :
    1) Pajak Kendaraan Bermotor
    2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    4) Pajak Air Permukaan dan
    5) Pajak Rokok akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2014.
b) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
    1) Pajak Hotel
    2) Pajak Restoran
    3) Pajak Hiburan
    4) Pajak Reklame
    5) Pajak Penerangan Jalan

2. Retribusi Daerah

Menurut Yani (2008) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dari beberapa teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas-fasilitas atau tempat penggunaan atau mendapat jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu.
2. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha (Kadjatmiko, 2002 : 78).

Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi

pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan, pesanggrahan dan villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2004:68), "Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan". Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1) bagian laba Perusahaan milik Daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan Bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank, 4) bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2004:69), "pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah". Menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: 1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah.

2.2.3. Pajak Hotel Dan Restoran

Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

3. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitasnolaraga dan hiburan.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusaha hotel.

5. Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

   a. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel

   b. Tariff Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

   c. Perhitungan Pajak Hotel

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel

6. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut

ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi.

7. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan

a. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya kepadda bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

b. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan ddiawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak.

8. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib Pajak Hotel wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Hotel yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal massa pajak wajib mengisi SPTPD.

9. Penetapan Pajak Hotel

a. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak.

b. Penetapan Pajak Hotel

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

c. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika Pajak Hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

10. Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

a. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak Hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.

b. Penagihan Pajak Hotel

Apabila Pajak Hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakkukan tindakan penagihan pajak.

11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, bupati/walikota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapa kesalahan tulis atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Keberatan dan Banding

a. Keberatan

Wajib Pajak Hotel yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh bupati/walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dala surat ketetapan pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan

hanya kepada bupati/walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

b. Banding

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal demikian wajib Pajak Hotel diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hokum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

13. Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Hotel

a. Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. Wajib Pajak Hotel dengan peredaran usaha tertentu, umumnya Rp 300.000.000,00 per tahun ke atas, wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga penggantian dari penjualan makanan dan atau minuman.

b. Pemeriksaan Pajak Hotel

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati/walikota atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.

14. Keringanan dan Pembebasan Pajak Hotel

Berdasarkan permohonan wajib pajak, bupati/walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Hotel.

15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel

Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran Pajak Hotel, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, ataupun sebab lainnya.

16. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel

a. Bagi Hasil Pajak Hotel

Khusus Pajak Hotel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Hotel. Hasil penerimaan Pajak Hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa diwilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.

b. Biaya Pemungutan Pajak Hotel

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota.

17. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel

a. Kedaluwarsa Penagihan Pajak Hotel

Hak bupati/walikota untuk melakukan penagihan Pajak Hotel kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.

b. Penghapusan Piutang Pajak Hotel

Piurtang Pajak Hotel yang penagihannya sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinass Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

18. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak Hotel

a. Kewajiban Pejabat

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota untuk mengelolah Pajak Hotel dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. Ketentuan Pidana

Wajib Pajak Hotel, yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara/kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Penyidikan Pajak Hotel

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Hotel, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Sedangkan yang di maksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Tahun 1997 pajak atas restoran di samakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Tetapi berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut di pisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Keberadaan pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota di atur juga dalam undang-undang Nomor 28 Tahun

2009, yang mulai tanggal 1 januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

2. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Pelayanan yang di sediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.

3. Bukan Objek Pajak Restoran

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 ayat 3 di sebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang di sediakan oleh restoran yang nilainya penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang di tetapkan dengan peraturan daerah.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran, secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran, sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

5. Tariff Pajak Restoran

Tarif pajak restoran di tetapkan paling tinggi sebesar 10% dan di tetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

6. Perhitungan Pajak Restoran

Pajak terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak = tariff pajak x jumlah pembayaran yang di terima atau yang seharusnya di terima restoran.

7. Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak restoran tidak dapat di borongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat di serahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, di mungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpun data objek dan subjek pajak.

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menhitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukan system self assessment, yaitu wajib pajak di beri kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

8. Pembayaran Dan Penagihan Pajak Restoran

a. Pembayaran Pajak Restoran

Pajak restoran terutang di lunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak di tetapkan oleh bupati/walikota.

Pembayaran pajak restoran yang terutang di lakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang di tunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang di tentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak di lakukan di tempat lain yang di tunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran di lakukan pada hari kerja berikutnya.

b. Pengihan Pajak Restoran

Apabila pajak restoran yang terutang tidak di lunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang di tunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak di lakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak harus di bayar bertambah. Penagihan pajak di lakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan di keluarkan oleh pejabat yang di tunjuk oleh bupati/walikota.

9. Keberatan dan Banding

a. Keberatan.

Wajib pajak restoran yang tidak puas atas penetapan pajak yang di lakukan oleh bupati/walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/ walikota atau pejabat yang di tunjuk. Apa bila wajib pajak berpendapat bahwa dalam surat

ketetapan pajak tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati/walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan di sertai alas an-alasan yang jelas.

Keberatan yang di ajukan adalah terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumalah yang seharusnya di bayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan di lakukan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan daerah tentang pajak restoran yang di maksud. Keberatan harus di ajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.

b. Banding.

Keputusan keberatan yang di terbitkan oleh bupati/walikota di sampaikan kepada wajin pajak untuk di laksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal demikian wajib pajak restoran di berikan hakk untuk melakukan perlwanan secara hokum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan menngenai keberatannya yang di tetapkan oleh bupati/ walikota atau pejabat yang di tunjuk. Permohonan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Todaro (2000), pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk produk pertanian).

Menurut Nasrull (2010), PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (income) yang relatif besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Semakin besar tingkat PDRB masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu :

1. Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
2. Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
3. Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Dalam penyajiannya, PDRB selalu dibedakan atas dua, yakni atas dasar harga konstan dan atas dan dasar harga berlaku. Adapun defenisi pembagian PDRB ini adalah sebagai berikut:

1. PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
2. PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena nilai PDRB atas dasar harga konstan ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besarnya perekonomian suatu daerah.

Untuk menghindari perubahan harga pada perhitungan PDRB, dilakukan atas dasar harga konstan, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Dalam penghitungan PDRB, menurut lapangan usaha dibagi menjadi 9 sektor yaitu :

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, gas dan air minum
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Angkutan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa lainnya.

2.2.5. Jumlah Wisatawan

Menurut Soekadijo (2001) wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya. Mereka yang dianggap sebagai wisatawan adalah orang yang melakukan kesenangan, karena alasan kesehatan dan sebagainya: orang yang melakukan perjalanan untuk pertemuan-pertemuan atau dalam kapasitasnya sebagai perwakilan (ilmu pengetahuan, administrasi, diplomatik, keagamaan, atlit dan alasan bisnis) (Foster, D 1987, dalam Sukarsa 1999).

Secara teoritis dalam Austriana (2005) semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah melalui PDRB sektor pariwisata. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah juga akan semakin meningkat.

Secara sederhana konsumsi sektor pariwisata merupakan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan selama tinggal di Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang dikunjunginya mulai dari paket perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, rekreasi budaya dan olahraga, belanja, dan lain-lain.

2.2.6. Pembangunan/Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.

Menurut Kodoatie (2005), infrastruktur merupakan sistem yang menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan, dimana sistem ini dapat dipakai sebagai dasar didalam mengambil kebijakan. Infrastruktur dapat dikatan sebagai jembatan antar sistemsistem yang terkait.

Menurut Stone (1974), arti infrastruktur adalah berbagai fasilitias fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal transportasi, tenaga listrik, penyediaan air, pembuangan limbah, dan pelayanan pelayanan lainnya yang serupa. Secara khusus, tingkat infrastruktur ini terlihat pada kondisi dan panjang jalan, khususnya kondisi jalan yang baik, yang merupakan hal penting yang pengembangan dan perbaikannya harus dioptimalkan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari hari dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sehingga, semakin baik tingkat infrastruktur suatu daerah yang terlihat pada kondisi dan panjang jalan, maka semakin banyak pula aktivitas perekonomian yang berjalan, menyebabkan PDRB pun meningkat. Pengaruhnya terhadap pariwisata, dimana orang yang datang melakukan perjalanan wisata semakin meningkat, dikarenakan kondisi jalan yang semakin baik tadi, maka secara otomatis terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah.

2.3. Hipotesis

1. Diduga jumlah pajak hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diduga jumlah PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Diduga jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta.
4. Diduga pengeluaran pembangunan/infrastruktur berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

3.1.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Yogyakarta, Dinas Pariwisata Yogyakarta dan literatur-literatur lainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi. Data yang digunakan antara lain adalah jumlah pajak hotel dan restoran, jumlah PDRB, jumlah wisatawan dan pengeluaran pembangunan/infrastruktu. Data yang digunakan dalam penelitiian ini adalah *data panel*.

3.2 . Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang didapatkan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah di Daerah Istimewa Yogyakarta (rupiah).
2. Jumlah pajak hotel dan restoran adalah jumlah pendapatan yang di terima oleh pemerintah daerah dari pajak hotel dan restoran. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode tertentu (rupiah).

3. PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode tertentu (rupiah).
4. Jumlah wisatawan adalah besarnya jumlah wisatawa baik mancanegara maupun nusantara yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Total jumlah wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta (jiwa).
5. Pengeluaran pembangunan/infrastruktur merupakan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (rupiah).

3.3. Metode Analisis Data

3.3.1. Analisis Regresi Data Panel

Metode analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perilaku antara variabel dependen dengan variabel independen. Metode data panel merupakan gabungan antara cross section dengan time series pada awalnya diperkenalkan oleh Howles tahun 1950. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu.

Dalam penggunaan metode data panel terdapat dua macam informasi yang menjelasan mengenai informasi antar unit (cross-section) pada perbedaan antar subjek, dan informasi antar waktu (time series) yang terdapat pada perubahan

subjek waktu. Analisis data panel digunakan ketika kedua informasi telah tersedia. Kelebihan dalam penggunaan data panel antara lain (Widarjono, 2009) :

1. Kemampuan gabungan dua data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih besar sehingga menghasilkan degree of freedom yang lebih besar.
2. Penggabungan data cross section dan time series dapat mengatasi permasalahan yang timbul ketika dalam masalah untuk penghilangan variabel (commited variabel).

Secara matematis sbb :

$$Y = f (X1, X2, X3)$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Asli daerah (rupiah)

X1 : Jumlah Pajak Hotel dan Restoran (rupiah)

X2 : Jumlah PDRB (rupiah)

X3 : Jumlah Wisatawan (jiwa)

X4 : Pengeluaran Pembangunan/Infrastruktur

3.4. Estimasi Regresi Data Panel

Pengujian hipotesis estimasi dalam penelitian ini meliputi pengujian secara Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect.

3.4.1. *Common Effect Model* (CEM)

Teknik estimasi dengan mengkombinasi data antara data cross-section dan time series. Dengan menggabungkankedua data tersebut tanpa melihat perbedaan yang ada antar individu dan waktu maka kita mengestimasi bisa menggunakan

metode Ordinary Least Square (OLS) dan diasumsikan dalam berbagai kurun waktu yang ada dan perilaku data sama (Widarjono, 2009).

Persamaan matematis untuk model common effect akan mengestimasi dan dengan model sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \Sigma^{n}_{k=1}\beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

I : Banyaknya Observasi (1,2,.....,n)

T : Banyaknya Waktu (1,2.....,t)

N x t : Banyaknya Data Panel

ε : Residual

3.4.2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect merupakan model regresi efek tetap. Efek tetap ini adalah bahwa satu obyek observasi memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Koefisien regresi akan tetap besarnya dari waktu ke waktu (time invariant) (Sriyana, 2014).

Terdapat 2 asumsi yang ada dalam model fixed effect yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit. Intersep pada suatu hasil regresi sangat mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Pendekatan fixed effect dapat dilakukan dengan variabel dummy untuk menjelaskan adanya perbedaan intersep. Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep antar individu merupakan

model fixed effect yang paling banyak digunakan. Model ini dapat diregresi dengan teknik Least Squares Dummy Variables (LSDV).

2. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu atau unit dan antar periode waktu. Pendekatan dari metode estimasi regresi data panel ini adalah asumsi tentang intersep yang berubah baik antar individu obyek analisis maupun waktu, namun slope masih diasumsikan tetap.

Model Fixed Effect dengan menggunakan teknik dummy dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \ldots + e_{it}$$

3.4.3. *Random Effect Model* (REM)

Di dalam model fixed effect mengandung variabel dummy, tujuannya untuk menwakili penulis atas ketidaktahuannya tentang model sebenarnya. Namun, yang terjadi memiliki konsenkuensi yang dapat mengurangi derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter. Namun masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) yang dikenal dengan model random effect. Dalam model random effects ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Widarjono, 2009).

3.5. Penentuan Model Estimasi

Dari ketiga metode yang terdapat pada teknik pengujian *model data panel*, untuk menguji kebaikan atau kesesuaian model dapat digunakan *chow test* dan *hausman test*. Dimana Chow Test digunakan untuk menguji kesesuaian data yang

diperoleh dari *pooled least square* dan data yang diperoleh dari *metode fixed effect*. Kemudian dilakukan *Hausman Test* untuk dipilih yang terbaik dari model yang diperoleh dari hasil *Chow Test* dan *metode random effect*.

3.5.1. Chow test

Chow test adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients atau uji kesamaan koefisien test ini ditemukan oleh Gregory Chow. Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian model data panel, dapat dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah metode fixed effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau common effect.

Ho : Model Common Effect

Ha : Model Fixed Effect

Hipotesis dari chow test adalah :

- Prob (p value) > α, maka menerima H0 dan menolak Ha sehingga model common effect yang valid digunakan.
- Prob (p value) < α, maka akan menolak H0 dan menerima Ha sehingga model fixed effect yang valid digunakan.

  A (signifikan level) atau alpha yang merupakan batas kesalahan maksimal yang dijadikan patokan dalam perhitungan statistik. Berdasarkan konvesi, aplha yang biasa digunakan adalah sebesar 1% (0,01) 5% (0,05) dan 10% (0,10).

Apabila nilai test statitik (prob) dari hasil pengujian lebih kecil dari α, maka hasil hipotesis nol diterima. Sehingga model yang akan diterima dan digunakan adalah model common effect.

Adapun dasar penolakan terhadap hipotesis H0 adalah yang telah dirumuskan oleh chow test, Uji F statsitiknya adalah sebagai berikut

$$\boldsymbol{F = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/m}{\frac{(RSS_2)}{(n-k)}}}$$

Dimana :

RSS_1 dan RSS_2 : *Residual Sum Square* teknik tanpa variabel *dummy* dan *teknik model fixed effect* dengan variabel *dummy*.

n : Jumlah data cross section

m : Jumlah data time series

k : Jumlah variabel penjelas

Chow test mengikuti distribusi F- statistik dengan derajat bebas (m,n,k), jika nilai Chow statistic (F-Statistik) lebih besar hasil pengujiannya dibandingkan F tabel maka menolak hipotesis sehingga model yang digunakan adalah fixed effect dan begitu juga sebaliknya apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis diterima yang artinya model yang tepat adalah model common effect.

3.5.2. Hausmant Test

Setelah melakukan uji chow, maka selanjutnya akan dilakukan uji yang membahas tentang pemilihan metode mana yang terbaik. Hausman Test merupakan pengujian statsitik sebagai dasar pertimbangan untuk memilih apakah

menggunakan model fixed effect atau random effect. Terdapat dua hal sebagai dasar pertimbangan yaitu, (1) ada tidaknya korelasi antara error terms dan variabel independen X. Jika diasumsikan memiliki korelasi antara error terms dan variabel independen X maka model random effect yang lebih tepat dan sebalikya, (2) apabila sampel yang diambil hanya bagian kecil dari populasi maka error termsyang akan kita dapatkan bersifat random sehingga model random effect lebih tepat. Hausman test didasarkan pada ide bahwa Least Squares Dummy Variables (LDSV) di dalam metode fixed effect dan Generalized Leasr Squares (GLS) dalam metode random effect adalah efisien. Sedangkan Ordinary Least Squares (OLS) adalah metode fixed effect tidak efisien. Karena itu, uji hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga hausman test dapat dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Hausman Test dilakukan dengan hipotesis :

Ho : Random Effect Models

H1 : Fixed Effect Models

Statistik Hausman test mengikuti distribusi statistik Chi Squares dengan degress of freedom (df) sebanyak jumlah variabel bebas. Hipotesis nolnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah random effect dan hipotesis alternatifnya adalah fixed effect. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dibandingkan nilai kritisnya maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang paling tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect dan sebaliknya, apabila nilai Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Random Effect (Widarjono, 2009).

3.5.3. Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik dari model Common Effect maka menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji signifikansi Random Effectdikembangkan oleh Breusch-Pagan. Metode Bruesch Pagan untuk menguji signifikansi model Random Effect pada nilai residual dari metode OLS.

Uji Lagrange Multiplier (LM) didasarkan pada distribusi chi squares dengan degree of freedom(df) sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritisnya maka menolak hipotesis nol. Apabila nilai LM terhitung lebih besar dari nilai kritis chi-squares maka menolak hipotesis nol yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model random effect. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai chi-squares maka menerima hipotesis nol yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah common effect (Widarjono, 2007).

3.6. Pengujian Statistik

Pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini meliputi pengujian ketetapan perkiraan (R^2), pengujian hipotesis secara serempak (uji F), dan pengujian secara persial (uji T).

Tujuan pengujian hipotesis parsial (uji T) yaitu untuk menguji parameter secara parsial, dimana dengan tingkat kepercayaan tertentu mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen atau tidak.

3.6.1. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel dependen yaitu jumlah pajak hotel dan restoran (X1), PDRB (X2), jumlah wisatawan (X3) dan pengeluaran pembangunan (X4) terhadap variabel independen dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi (R^2). Koefisisen determinasi (R^2) yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mempunyai range antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai range yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk regresi runtun waktu (time series) mempunyai nilai R^2 yang tinggi. Hal ini terjadi karena setiap variabel yang berkembang dalam time series mampu menjelaskan dengan baik variabel lain yang juga berkembang dalam waktu yang sama. Sedangkan dalam data antar tempat atau ruang (cross section) menghasilkan nilai yang relatif rendah. Hal ini dikarenakan adanya variasi yang besar antara variabel yang diteliti (Widarjono,2009).

Insukindro (1998) menekankan bahwa R^2 salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik. Alasannya apabila suatu estimasi regresi linier menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi, akan tetapi tidak konsisten dengan teori ekonomika yang dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos dari uji asumsi klasik, maka model tersebut bukanlah model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik.

Kelemahan mendasar penggunaan R^2 adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Formulasi untuk menghitung determinasi koefisien adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{Jumlah\ kuadrat\ yang\ dijelaskan}{Jumlah\ total\ kuadrat}$$

Dimana $0 < R^2 < 1$ dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Jika nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berati kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent sangat terbatas atau kecil.
- Jika nilai R^2 yang besar atau mendekati satu, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi variasi variabel dependen.

3.6.2. Koefisien Regresi (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah koefisien regresi signifikan. Koefisien regresi yang signifikan adalah koefisien regresi secara statistik tidak sama dengan nol. Dalam pengujian ini akan memperlihatkan hubungan satu pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Membuat hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) sbb:

Ho : $\beta_1 = 0$, maka variable independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variable dependen.

Ha : $\beta_1 \neq 0$, maka variable independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen.

2. Menentukan kriteria pengujian dengan level of sinificant (α) 5% dan df pembilang (k-1) dan penyebut (n-k).

- Apabila $F_{statistik} \geq F_{tabel}$ (kritis), maka menolak Ho, yang artinya secara simultan variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent.
- Apabila $F_{statistik} \leq F_{tabel}$ (kritis), maka menerima Ho, artinya secara simultan variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.

3. Mencari nilai $F_{statistik}$ (Gujarati, 2003).

$$F_{statistik} = \frac{R^2(k-1)}{(1-R^2)(N-K)}$$

Dimana :

R2 : Koefisien Determinasi

k : Jumlah Variabel Independen

n : Jumlah Observasi

3.6.3. Koefisisen Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji T menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen, maka digunakan pengujian tingkat signifikasi hipotesis dari masing masing variabel independen menggunakan uji t dengan uji sebagai berikut:

Langkah-langkah :

1. Membuat hipotesis melalui uji satu sisi atau dua sisi :

   Uji hipotesis positif satu sisi sebagai berikut:

   Ho : $\beta_1 < 0$ (Variabel independen tidak berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen).

   Ha : $\beta_1 > 0$ (Variabel independen berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen).

   Uji hipotesis negatif satu sisi sebagai berikut :

   Ho : $\beta_1 > 0$ (Variabel independen tidak berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen)

   Ha : $\beta_1 < 0$ (Variabel independen berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen)

2. Menentukan kriteria pengujian pengaruh positif

   Apabila $t_{statistik} < t_{tabel}$ maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependent.

3. Menentukan kriteria pengujian pengaruh negatif

Apabila nilai $t_{statistik} > t_{tabel}$, maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh secara negatif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Apabila $t_{statistik} < t_{tabel}$, maka Ho diterima, artinya ada pengaruh secara negatif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependent.

4. Menghitung nilai $t_{statistik}$ terhadap β_1 dan mencari nilai t kritis dari tabel distribusi t. Maka nilai t-hitung dapat dicari dengan formula sebagai berikut

$$t = \frac{\beta_1}{se\beta_1}$$

Keterangan :

T : Nilai $t_{statistik}$

β_1 : Koefisien regresi

Se β_1: Standar eror β_1

Hasil Uji t :

a. Apabila t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak yaitu kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yng berarti secara hipotesis β dianggap berbeda dan dianggap lebih berarti dari nol.
b. Apabila t-hitung < t-tabel maka β diterima maka hubungan antara variabel penjelas dengan variabel yang dijelaskan secara hipotesis dianggap tidak berarti.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Analisis Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Yogyakarta. Dalam penelitian ini, data yang di gunakan berupa data panel yang merupakan gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtun waktu (time series) pada awalnya di perkenalkan oleh Howles sekitar tahun 1950. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen yang terdiri dari jumlah pajak hotel dan restoran, jumlah PDRB, jumlah wisatawan dan pengeluaran pembangunan.sedangkan variabel dependennya yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Analisis penelitian ini menggunakan analisis statistik/ekonometrika dengan alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini berupa alat bantu komputer melalui program eviews 8. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta.

4.2. Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di sebut PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang Undang nomor 33 tahun 2004)

Tabel 4.1

Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta tahun 2010-2016 (ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kota yogyakarta	179,423,640	228,870,559	241,190,745	383,052,140	470,641,528	510,548,830	540,504,300
kab sleman	163,442,921	227,108,171	301,069,539	456,026,490	573,337,599	643,130,079	717,151,176
kab bantul	90,388,800	128,896,456	166,597,778	224,197,864	357,411,062	390,624,492	404,454,703
kab kulonprogo	48,280,640	53,752,293	74,028,663	95,991,512	158,623,927	170,822,326	180,273,363
kab gunung kidul	42,521,521	54,462,418	67,050,781	83,427,447	159,304,338	196,099,244	206,278,866

Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta

Tabel 4.1 menunjukkan total jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 5 kabupaten/kota di Yogyakarta selama periode 2010-2016. Jumlah PAD setiap tahun 2010-2016 terus mengalami kenaikan.

4.2.2. Pajak Hotel dan Restauran

a. Pajak Hotel

Sesuai dengan undang undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran.

b. Pajak Restaurant

Sesuai dengan undang undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restaurant adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restaurant. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan

atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Tabel 4.2

Pajak hotel dan retauran tahun 2010 – 2016 (ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kota yogyakarta	45,804,679	51,681,357	72,199,315	87,331,577	106,789,831	106,789,831	150,950,199
kab sleman	32,668,879	35,895,365	48,975,872	62,547,222	77,779,907	91,434,201	118,468,738
kab bantul	485,505	1,654,414	3,679,499	4,916,961	5,627,251	6,599,191	8,358,234
kab kulonprogo	110,630	131,320	482,303	711,225	709,645	1,021,300	1,384,003
kab gunung kidul	73,264	109,551	884,376	1,382,653	1,972,501	3,073,735	4,881,697

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Tabel 4.2 menunjukan total jumlah pajak hotel dan restaurant kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2016. Jumlah pajak hotel dan restoran dari tahun 2010-2016 terus mengalami kenaikan.

4.2.3. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu (Sukirno,2004). Penyajian PDRB disajikan dalam dua bentuk yakni PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar nilai konstan.

Tabel 4.3

Jumlah PDRB tahun 2010-2016 (juta rupiah)

Kabupaten/Kota	tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kota yogyakarta	17,202,154	18,997,186	20,536,855	22,537,791	24,664,285	26,792,641	28,915,781
kab sleman	21,481,644	22,645,851	23,957,113	25,367,414	26,713,071	28,098,007	29,573,895
kab bantul	12,114,059	12,728,666	13,407,021	14,138,719	14,851,124	15,588,520	16,377,984
kab kulonprogo	5,033,073	5,246,146	5,475,148	5,741,660	6,004,316	6,281,795	6,580,776
kab gunung kidul	8,848,037	9,248,010	9,695,979	10,177,432	10,639,792	11,152,363	11,697,446

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Tabel 4.3 menunjukan jumlah PDRB kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2016, jumlah PDRB pada tahun 2010-2016 terus mengalami kenaikan.

4.2.4. Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang di datanginya.

Tabel 4.4

Jumlah wisatawan di kabupaten/kota di Yogyakarta tahun 2010-2016 (ribu orang)

Kabupaten/Kota	tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kota yogyakarta	3,538,139	3,197,312	4,083,605	4,673,366	5,251,352	5,619,231	5,520,952
kab sleman	2,499,877	2,490,063	3,042,232	3,654,145	4,223,958	4,950,934	5,942,468
kab bantul	1,300,042	2,378,209	2,378,209	2,037,874	2,708,816	4,519,199	5,148,633
kab kulonprogo	444,125	546,797	596,529	695,850	904,972	1,289,695	1,353,400
kab gunung kidul	1,007,324	688,405	1,279,065	1,822,251	3,685,137	2,642,759	3,479,890

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Tabel 4.4 menunjukkan total jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten/kota di Yogyakarta pada tahun 2010-2016. Jumlah yang wisatawan yang berkunjung pada tahun 2010-2016 naik dan turun. Pada tahun 2011 kabupaten gunung kidul mengalami penurunan jumlah wisatawan yang signifikan yaitu sebesar 688,405 orang, namun naik lagi pada tahun 2012 sebesar 1,279,065 orang.

4.2.5. Jumlah Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai.

Tabel 4.5

Jumlah Pengeluaran Pembangunan Kabupaten/Kota Yogyakarta Tahun 2010-2016 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kota yogyakarta	54,040,432	59,151,111	88,335,590	167,079,742	193,078,279	213,423,743	259,589,340
kab sleman	99,812,269	96,111,399	132,536,252	206,859,865	282,862,049	426,782,827	344,002,326
kab bantul	99,512,269	119,417,030	140,106,752	183,269,840	310,415,290	334,880,395	284,060,532
kab kulonprogo	46,582,088	105,604,886	147,830,580	123,313,526	146,576,953	226,055,713	241,983,753
kab gunung kidul	47,001,128	111,021,473	164,360,941	156,373,179	127,289,721	238,175,034	260,198,561

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY

Tabel 4.5 menunjukkan jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk pembangunan pada tahun 2010-2016. Terjadi penurunan pengeluaran pembangunan pada kabupaten Sleman tahun 2011, terjadi pula pada kabupaten kulonprogo tahun 2013 dan kabupaten gunung kidul tahun 2014.

4.3. Hasil Model Estimasi Data Panel

4.3.1. Uji Chow Test

Pengujian yang dilakukan menggunakan uji chow bertujuan untuk memilih model yang terbaik antara *common effect model* dengan *fixed effect model* dengan berdasarkan hipotesa sebagai berikut :

Ho : memilih menggunakan model estimasi *common effect*

Ha : memilih menggunakan model estimasi *fixed effect*

Untuk melakukan pemilihan antara *common effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat *p-value* signifikan (kurang dari α = 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi *fixed effect*, begitu juga sebaliknya jika *p-value* tidak signifikan (lebih besar dari α=5%) maka model yang digunakan adalah estimasi *common effect*.

Tabel 4.6

Hasil Regresi Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.045661	(4,26)	0.0111
Cross-section Chi-square	16.936931	4	0.0020

Sumber: *eviews8*

Pada tabel di atas hasil regresi dengan menggunakan *eviews 8* maka didapatkan nilai hasil probabilitas chi-square = 0.0020, yang berarti probabilitas = 0.0020 < α=5%, sehingga model yang digunakan adalah estimasi *fixed effect*.

4.3.2. Uji Hausman Test

Uji yang digunakan untuk memilih model yang terbaik antara *random effect model* dengan *fixed effect model* dengan berdasarkan hipotesis sebagai berikut :

Ho : memilih menggunakan estimasi *random effect*

Ha : memilih menggunakan estimasi *fixed effect*

Untuk melakukan pemilihan antara model *random effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan melihat *p-value* signifikan (kurang dari α=5%) maka

model yang digunakan adalah estimasi *fixed effect*, begitu juga sebaliknya jika *p-value* tidak signifikan (lebih besar dari α=5%) maka model yang digunakan adalah estimasi *random effect*

Tabel 4.7

Hasil Regresi Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.182644	4	0.0028

Sumber: *eviews8*

Pada tabel diatas hasil regresi dengan menggunakan *eviews 8* maka didapatkan nilai hasil probabilitas Chi-square = 0.0028, yang berarti probabilitas = 0.0028 < α=5%, sehingga model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*.

4.3.3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Tabel 4.8

Hasil regresi fixed effect model

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/29/18 Time: 18:53

Sample: 2010 2016

Included observations: 7

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.42E+08	1.19E+08	-1.187762	0.2457
X1?	1.171665	0.919460	1.274297	0.2138
X2?	9.730770	10.73637	0.906337	0.3731
X3?	32.67169	11.20704	2.915283	0.0072
X4?	0.644173	0.135994	4.736775	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
_KOTA_JOGJA--C	-63578302			
_SLEMAN--C	-15129781			
_BANTUL--C	19196094			
_KULONPROGO--C	73602586			
_GUNUNG_KIDUL--C	-14090597			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.972421	Mean dependent var	2.57E+08
Adjusted R-squared	0.963935	S.D. dependent var	1.85E+08
S.E. of regression	35150114	Akaike info criterion	37.80519

Sum squared resid	3.21E+16	Schwarz criterion	38.20513
Log likelihood	-652.5908	Hannan-Quinn criter.	37.94325
F-statistic	114.5921	Durbin-Watson stat	1.549376
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: eviews8

Y = -1.42E+08 + 1.171665X1 + 9.730770X2 + 32.67169X3 + 0.644173X4 + e

Keterangan :

Y = pendapatan asli daerah

β_0 = koefisien intersep

β_1 = koefisien pengaruh X1 (jumlah pajak hotel dan restaurant)

β_2 = koefisien pengaruh X2 (jumlah PDRB)

β_3 = koefisien pengaruh X3 (jumlah wisatawan)

β_4 = koefisien pengaruh X4 (pengeluaran pembangunan)

4.3.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat. Dari hasil regresi pengaruh jumlah pajak hotel dan restaurant, jumlah PDRB, jumlah wisatawan, pengeluaran pembangunan terhadap pendapatan asli daerah Yogyakarta tahun 2010 – 2016 dengan estimasi *fixed effect*, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.972421 atau sebesar 97%. Hal ini membuktikan bahwa variasi variabel jumlah pajak hotel dan restaurann, jumlah PDRB, jumlah wisatawan, dan pengeluaran pembangunan dapat dijelaskan oleh variabel tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.3.5 Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Uji F dilakukan untik mengetahui apakah variabel independent secara bersama sama mempengaruhi variabel dependent atau tidak berpengaruh. Dari hasil regresi didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.000000 < α = 5%, artinya signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen.

4.3.6. Uji Signifikansi Parameter Individu (uji t)

Tabel 4.9

Hasil Regresi Pengujian Hipotesis

variabel	t-statistik	prob	keterangan
X1	1.274297	0.2138	Tidak signifikan
X2	0.906337	0.3731	Tidak signifikan
X3	2.915283	0.0072	Signifikan
X4	4.736775	0.0001	Signifikan

Sumber : *eviews8*

Berdasarkan uji fixed effect yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. X1 (jumlah pajak hotel dan restaurant)

Dari hasil signifikansi didapatkan probabilitas 0.2138 > α=5% berarti tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Yogyakarta

2. X2 (jumlah PDRB)

Dari hasil signifikansi probabilitas 0.3731 > α=5% berarti tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Yogyakarta.

3. X3 (jumlah wisatawan)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas 0.0072 < α = 5% berarti signifikan dan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Yogyakarta. Jumlah wisatawan mempunyai koefisien sebesar 32.67169 serta berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Yogyakarta tahun 2010-2016. Artinya ketika jumlah wisatawan naik 1% maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 32.67169 milyar.

4. X4 (pengeluaran pembangunan)

Dari hasil uji signifikansi didapatkan probabilitas 0.0001 < α = 5%, berarti signifikan dan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Yogyakarta. Pengeluaran pembangunan mempunyai koefisien sebesar 0.644173 serta berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Yogyakarta tahun 2010-2016. Artinya ketika pengeluaran pembangunan bertambah 1% maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah Yogyakarta sebesar 0.644173 milyar.

4.3.7. Persamaan Estimasi Dengan Intersep Pembeda *Cross Effect*

Persamaan estimasi dengan mempertimbangkan *cross effect* dapat dilakukan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan hasil estimasi koefisien cross effect. Cross effect didapatkan berdasarkan yang mengikuti jumlah individu dalam penelitian, maka koefisien tersebut akan dimiliki oleh masing masing unit atau individu. (Sriyana, 2014)

Tabel 4.10

Nilai crossid kabupaten/kota

Crossid	Effect
Kota Yogyakarta	-63578302
Kabupaten sleman	-15129781
Kabupaten Bantul	19196094
Kabupaten kulonprogo	73602586
Kabupaten gunung kidul	-14090597

Sumber: *eviews8*

Tabel 4.10 menunjukkan nilai crossid dari masing masing kabupaten/kota di Yogyakarta.

Persamaan regresi:

Kota Yogyakarta

$Y_{it =}$ -1.4200000000 – 63578302 + 1.171665X1 + 9.730770X2 + 32.67169X3 + 0.644173X4 + $E_{it =}$ -63578259,2

Kabupaten sleman

$Y_{it =}$ -1.4200000000 – 15129781+ 1.171665X1 + 9.730770X2 + 32.67169X3 + 0.644173X4 + $E_{it =}$ -15129738,2

Kabupaten Bantul

$Y_{it =}$ -1.4200000000 + 19196094 + 1.171665X1 + 9.730770X2 + 32.67169X3 + 0.644173X4 + $E_{it =}$ 19196136,8

Kabupaten kulonprogo

$Y_{it =}$ -1.4200000000 + 73602586 + 1.171665X1 + 9.730770X2 + 32.67169X3 + 0.644173X4 + $E_{it =}$ 73602628,8

Kabupaten gunung kidul

$Y_{it =}$ -1.4200000000 - 14090597 + 1.171665X1 + 9.730770X2 + 32.67169X3 + 0.644173X4 + $E_{it =}$ -14090554,2

Dari hasil tersebut dapat terlihat besarnya pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di setiap kabupaten/kota di Yogyakarta. Untuk kota Yogyakarta tingkat pendapatan asli daerah sebesar -63578259,2. Kabupaten sleman tingkat pendapatan asli daerah sebesar -15129738,2. Kabupaten Bantul tingkat pendapatan asli daerah sebesar 19196136,8. Kabupaten kulonprogo tingkat pendapatan asli daerah sebesar 73602628,8. Kabupaten gunung kidul tingkat pendapatan asli daerah sebesar -14090554,2.

Dari hasil tersebut menunjukkan tingkat pendapatan asli daerah paling rendah yaitu kabupaten gunung kidul dengan nilai -14090554,2, sedangkan untuk tingkat pendapatan asli daerah paling tinggi yaitu kabupaten kulonprogo dengan nilai 73602628,8.

4.4. Analisis Ekonomi

4.4.1. Analisi Pengaruh Jumlah Pajak Hotel Dan Restaurant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta

Dari hasil pengolahan data diketahui dahwa variabel pajak hotel dan restaurant tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta, ini di sebabkan karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah di

Yogyakarta masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar dari pada pajak hotel dan restaurant.

Hasil penelitian mendukung penelitian dari Siti Rochimah (2014) yang menemukan bahwa pajak hotel dan restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.4.2. Analisis Pengaruh Jumlah PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta

Dari hasil pengolahan data diketahui dahwa variabel jumlah PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta, jika secara teori hubungan antara PAD dan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dimana semakin meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program program pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi hal ini berbeda dengan keadaan di provinsi Yogyakarta, dimana PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Maka hal ini mengasumsikan tentang bagaimana kepatuhan masyarakat kabupaten/kota di Yogyakarta dalam membayar pungutan pajak dan retribusi daerah serta bagaimana kebijakan pemerintah daerah provinsi Yogyakarta dalam penetapan kebijakan pembayaran pajak beserta ketetapan tarif pajaknya. Kemungkinan inilah yang menyebabkan variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, menjadi tidak berpengaruh karna belum meratanya sarana dan prasarana atau infrastruktur yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta untuk

pemungutan pajak dan retribusi serta kepatuhan masyarakat di provinsi Yogyakarta yang masih kurang tertib dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga berdampak pada kurangnya atau belum tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Hasil penelitian mendukung penelitian dari Anggun Tri (2017) yang menemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.4.3. Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta

Dari hasil pengolahan data diketahui dahwa variabel jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta, ini di sebabkan oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, bahwa semakin lama wisatawan berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal didaerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumstif untuk produk produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Terbukti dalam variabel ini jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Yogyakrta.

Hasil penelitian mendukung penelitian dari Windriyaningrum (2013) dan Astuti (2012) yang menemukan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.4.4. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pembangunan/Infrastruktur Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta

Dari hasil pengolahan data diketahui dahwa variabel pengeluaran pembangunan/infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta, hal ini di sebabkan oleh pembangunan/infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional pembangunan infrastruktur juga memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersdiaan infrastruktur seperti, transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi. Sehingga semakin baik kondisi infrastruktur khususnya di setiap tempat pariwisata seperti kondisi jalan dan panjang jalan, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah Yogyakarta, melalui sektor pariwisata. Terbukti dalam variabel ini pengeluaran pembangunan/infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta.

Hasil penelitian mendukung penelitian dari Reno A (2017) yang menemukan bahwa pengeluaran pembangunan/infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini aadalah:

1. Pajak hotel dan restaurant tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta tahun 2010 – 2016.
2. PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta tahun 2010 – 2016.
3. Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta tahun 2010 – 2016.
4. Pengeluaran pembangunan/infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta tahun 2010 – 2016.

5.2. Implikasi

Adapun saran saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu :

1. Dinas pelayanan pajak Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan lebih gencar dalam melakukan penyuluhan dan melakukan sosialisasi peraturan daerah (perda) kepada wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah pun harus melihat potensi pajak hotel dan restoran yang ada, yaitu dengan mengkaji ulang, mensurvei kembali wajib pajak karena banyak wajib pajak yang secara realita tidak masuk sebagai wajib pajak hotel dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu pemerintah diharapkan memperbaharui peraturan

daerahnya (perda) untuk lebih menegakkan sanksi sanksi kepada wajib pajak yang belum membayar atau menunggak pajaknya, khususnya wajib pajak hotel dan restoran.

2. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber penerimaan PDRB, khususnya pada sektor pariwisata dan industri harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat memberikan kontribusi kepada daerah untuk pembangunan daerah dan selanjutnya akan berdampak pada kemajuan daerah tersebut.
3. Untuk lebih meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke setiap kabupaten/kota dan obyek wisata yang ada di DIY, pemerintah DIY harus melakukan pembenahan untuk lebih menata kabupaten/kota dan obyek wisata sehingga bisa menarik minat wisatawan. Karena kondisi kebersihan, infrastruktur dan kemacetan bisa membuat wisatawan domestic maupun mancanegara kapok untuk kembali datang sehingga akan berdampak pada berkurangnya perolehan PAD dari sektor pariwisata.
4. Obyek wisata yang ada memerlukan perbaikan dan perawatan agar lebih baik, perbaikan kondisi jalan dan fasilitas pendukung juga diperlukan agar perjalanan wisatawan menuju obyek wisata yang dituju berjalan baik dan selamat. Pemerintah daerah diharapkan bisa membangun infrastruktur yang memadai yang bisa memberikan kenyamanan untuk wisatawan. Infrastruktur yang memadai akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung, sehingga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Albertus B.S, (2016) *"Tren perkembangan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2006 – 2014"* Skripsi Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Atni, F (2013) tentang *"Analisis Faktor Factor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Rokan Hulu"* Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Berbagai edisi. Di akses dari situs http://yogyakarta.bps.go.id

Cherrya, D. (2012) tentang *"Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan"*. Jurnal Ilmiah STIE MDP Volume 2, No 39 – 51

Ferry, P,(2012) *"Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah"*, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Haryono, dan Wijayanti, (editor) (2015) *"Statistik Keuangan Daerah Regional Financial Statistics Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014"* BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Hasan, B.K, (2016) *"The Effects Of Tourism Sector On Turkey's Economic Development"*, dissertation Economics and Administrative Sciences Faculty, Kocaeli, Turkey

Hidayah, Ade. (2016) Tentang *"Pengaruh Pajak Hotel Dan Restaurant, Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya"* Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

Meika, S, (2017) *"Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2008 2015"* Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unirvesitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

Novia R.I, (2013) *"Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Kabupaten Kutai Kartanegara"*. Skripsi Sarjan Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan Universitas 17 Agustus 1945

Nurindah, (2010) *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah"*, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Robert, T.S, (2016) *"The Influence of Tourism Sector to the Income of Simalungun Regency Area"*, dissertation simalungun university.

Rochimah, Siti. (2014) tentang *"Pengaruh Pajak Hotel Dan Restaurant, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap PAD Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012"*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonesia.

Tama, Reno. (2017) Tentang *"Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Karesidenan Surakarta Tahun 2011 – 2015"*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wahyuni, Anggun. (2017) tentang *"Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan PAD Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2016)"*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.

Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Variabel Dependen dan Independen

Tahun	Kab/Kota	Y	X1	X2	X3	X4
2010	Kota Yogyakarta	179423640	45804679	17202154	3538139	54040432
2011	Kota Yogyakarta	228870559	51681357	18997186	3197312	59151111
2012	Kota Yogyakarta	241190745	72199315	20536855	4083605	88335590
2013	Kota Yogyakarta	383052140	87331577	22537791	4673366	167079742
2014	Kota Yogyakarta	470641528	106789831	24664285	5251352	193078279
2015	Kota Yogyakarta	510548830	106789831	26792641	5619231	213423743
2016	Kota Yogyakarta	540504300	150950199	28915781	5520952	259589340
2010	Kab Sleman	163442921	32668879	21481644	2499877	99812269
2011	Kab Sleman	227108171	35895365	22645851	2490063	96111399
2012	Kab Sleman	301069539	48975872	23957113	3042232	132536252
2013	Kab Sleman	456026490	62547222	25367414	3654145	206859865
2014	Kab Sleman	573337599	77779907	26713071	4223958	282862049
2015	Kab Sleman	643130079	91434201	28098007	4950934	426782827
2016	Kab Sleman	717151176	118468738	29573895	5942468	344002326
2010	Kab Bantul	90388800	485505	12114059	1300042	99512269
2011	Kab Bantul	128896456	1654414	12728666	2378209	119417030
2012	Kab Bantul	166597778	3679499	13407021	2378209	140106752
2013	Kab Bantul	224197864	4916961	14138719	2037874	183269840
2014	Kab Bantul	357411062	5627251	14851124	2708816	310415290
2015	Kab Bantul	390624492	6599191	15588520	4519199	334880395
2016	Kab Bantul	404454703	8358234	16377984	5148633	284060532
2010	Kab kulonprogo	48280640	110630	5033073	444125	46582088
2011	Kab kulonprogo	53752293	131320	5246146	546797	105604886
2012	Kab kulonprogo	74028663	482303	5475148	596529	147830580
2013	Kab kulonprogo	95991512	711225	5741660	695850	123313526
2014	Kab kulonprogo	158623927	709645	6004316	904972	146576953
2015	Kab kulonprogo	170822326	1021300	6281795	1289695	226055713
2016	Kab kulonprogo	180273363	1384003	6580776	1353400	241983753
2010	Kab Gunung Kidul	42521521	73264	8848037	1007324	47001128
2011	Kab Gunung Kidul	54462418	109551	9248010	688405	111021473
2012	Kab Gunung Kidul	67050781	884379	9695979	1279065	164360941
2013	Kab Gunung Kidul	83427447	1382653	10177432	1822251	156373179
2014	Kab Gunung Kidul	159304338	1972501	10639792	3685137	127289721
2015	Kab Gunung Kidul	196099244	3073735	11152363	2642759	238175034
2016	Kab Gunung Kidul	206278866	4881697	11697446	3479890	260198561

LAMPIRAN II

Hasil Estimasi Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: FIXED
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.045661	(4,26)	0.0111
Cross-section Chi-square	16.936931	4	0.0020

LAMPIRAN III

Hasil Estimasi Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: RANDOM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.182644	4	0.0028

LAMPIRAN IV

Hasil Estimasi Common Effect Model

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/29/18 Time: 17:05
Sample: 2010 2016
Included observations: 7
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.01E+08	23935893	-4.204969	0.0002
X1?	1.195323	0.370192	3.228931	0.0030
X2?	7.534583	2.334457	3.227552	0.0030
X3?	14.30411	9.378578	1.525190	0.1377
X4?	0.896893	0.094995	9.441460	0.0000

R-squared	0.955255	Mean dependent var	2.57E+08
Adjusted R-squared	0.949289	S.D. dependent var	1.85E+08
S.E. of regression	41680509	Akaike info criterion	38.06053
Sum squared resid	5.21E+16	Schwarz criterion	38.28272
Log likelihood	-661.0593	Hannan-Quinn criter.	38.13723
F-statistic	160.1169	Durbin-Watson stat	1.339550
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN V

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/29/18 Time: 17:53
Sample: 2010 2016
Included observations: 7
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.42E+08	1.19E+08	-1.187762	0.2457
X1?	1.171665	0.919460	1.274297	0.2138
X2?	9.730770	10.73637	0.906337	0.3731
X3?	32.67169	11.20704	2.915283	0.0072
X4?	0.644173	0.135994	4.736775	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
_KOTA_JOGJA--C	-63578302			
_SLEMAN--C	-15129781			
_BANTUL--C	19196094			
_KULONPROGO--C	73602586			
_GUNUNG_KIDUL--C	-14090597			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.972421	Mean dependent var	2.57E+08
Adjusted R-squared	0.963935	S.D. dependent var	1.85E+08
S.E. of regression	35150114	Akaike info criterion	37.80519
Sum squared resid	3.21E+16	Schwarz criterion	38.20513
Log likelihood	-652.5908	Hannan-Quinn criter.	37.94325
F-statistic	114.5921	Durbin-Watson stat	1.549376
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN VI

Hasil Estimasi Random Effect Model

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/29/18 Time: 17:29
Sample: 2010 2016
Included observations: 7
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 35
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.01E+08	20185679	-4.986192	0.0000
X1?	1.195323	0.312191	3.828821	0.0006
X2?	7.534583	1.968700	3.827186	0.0006
X3?	14.30411	7.909167	1.808549	0.0806
X4?	0.896893	0.080112	11.19555	0.0000
Random Effects (Cross)				
_KOTA_JOGJA--C	-8.50E-06			
_SLEMAN--C	9.35E-06			
_BANTUL--C	8.30E-06			
_KULONPROGO--C	1.94E-05			
_GUNUNG_KIDUL--C	-2.86E-05			

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	12.15407	0.0000
Idiosyncratic random	35150114	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.955255	Mean dependent var	2.57E+08
Adjusted R-squared	0.949289	S.D. dependent var	1.85E+08
S.E. of regression	41680509	Sum squared resid	5.21E+16
F-statistic	160.1169	Durbin-Watson stat	1.339550
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.955255	Mean dependent var	2.57E+08
Sum squared resid	5.21E+16	Durbin-Watson stat	1.339550